



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 BATASAN JUDUL

Lembaga Pemasyarakatan : Tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Lembaga Pemasyarakatan umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang.

(Sumber: Wikipedia Indonesia\_PENJARA)

Klaten : Nama salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. (Sumber: Penulis)

Kesimpulannya : Tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan, yang merupakan institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, yang berlokasi di Klaten, Jawa Tengah.



## 1.2 LATAR BELAKANG

### 1.2.1 Keadaan Kriminalitas di Indonesia

Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia saat ini. Populasi tahanan penjara di kebanyakan negara meningkat dengan tajam pada awal tahun 1900-an. Jumlah tahanan Amerika Serikat adalah yang terbanyak berdasarkan negara, melebihi 2 juta jiwa; 70%-nya merupakan tahanan dengan kasus narkoba. Di Rwanda, hingga tahun 2002, lebih dari 100.000 orang ditahan dengan kecurigaan mengenai keikutsertaan mereka dalam genosida yang terjadi pada tahun 1994. (Sumber: Wikipedia Indonesia\_PENJARA)

Tingkat kejahatan di Indonesia meningkat dibanding tahun lalu. "Namun, peningkatannya tidak terlalu mencolok," ujar Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar dalam jumpa pers akhir tahun, Jumat. (Sumber: Tempo interaktif, Sabtu, 01 Januari 2005).

Jumlah narapidana/tahanan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LP) ataupun Rumah Tahanan (Rutan) mengalami peningkatan. Saat ini jumlahnya mencapai 20 persen dari jumlah seluruh penghuni LP/Rutan. (Sumber: Harian Gatra, 26 Desember 2005)

Kebutuhan yang meningkat tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat. Keahlian yang minim dan pendalaman agama yang kurang membuat orang sering kali berfikir pendek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peningkatan angka kriminalitas, yang salah satunya dipicu impitan masalah ekonomi, menjadi penyebab melonjaknya jumlah napi dan tahanan. (Sumber: Harian Kompas, 16 Mei 2005)



## 1.2.2 Tinjauan LP di Indonesia

### 1. LP mempunyai anggaran terbatas

Pemerintah Indonesia telah memiliki anggaran untuk pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan, baik itu anggaran makanan narapidana, fasilitas kesehatan, perawatan bangunan dan sebagainya. Kriminalitas yang semakin tinggi “memangkas” anggaran-anggaran untuk pelayanan-pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk anggaran perawatan dan pengobatan penghuni LP dan rutan hanya dianggarkan Rp 2.500 per orang per tahun. Jika LP dan rutan berada dalam kondisi kelebihan kapasitas seperti sekarang, ongkos itu menurun secara otomatis menjadi kurang dari Rp 1.000 per orang per tahun. (Sumber: Harian Kompas, 16 Mei 2005)

Untuk perawatan bangunan, LP hanya memiliki dana sebatas renovasi bangunan. “Penjara-penjara yang ada di Indonesia saat ini kebanyakan adalah peninggalan penjara-penjara pada masa kolonial dahulu yang hanya direnovasi. Jadi, belum ada penjara yang ideal.” (Sumber: Pernyataan Ir. Kunanto, Arsitek Lapas Pati dan beberapa lapas di Jawa Tengah).

### 2. Keadaan didalam LP

Dari survei yang dilakukan Yakub Gunawan, prison specialist dari klub Partisipasi Kemanusiaan (Partisan), yang aktif mendampingi napi dan tahanan pengidap HIV, di sebuah LP di Indonesia disampaikan bahwa di sel karantina yang hanya berukuran 6 x 5 meter, ada lebih dari 20 narapidana dan tahanan.

Tidak ada ventilasi udara yang mencukupi. Lubang udara satu-satunya hanya dari pintu jeruji besi. Pengap, benar-benar pengap. Tak pelak, siapa pun yang hadir dan berkunjung ke sel itu untuk beberapa saat harus sering-sering menahan napas. Ada kamar mandi di dalam sel tersebut.

Namun, jangan bayangkan sebuah kamar mandi yang tertutup rapat sebagaimana biasa. Kamar mandi itu hanya ditutup tembok setinggi pinggang orang dewasa, dengan pintu kain sarung. Ruangan



sel masih harus dipenuhi satu *space* kecil untuk menaruh kompor dan sejumlah peralatan memasak lain.

"Beginilah kondisi di rumah tahanan kita. Bagaimana mungkin tidak akan gampang menularkan penyakit kalau keadaannya seperti ini," ujar Yakub Gunawan, prison specialist dari klub Partisipasi Kemanusiaan (Partisan), yang aktif mendampingi napi dan tahanan pengidap HIV. (Sumber: Harian Kompas, 16 Mei 2005)

### 3. Bangunan hunian yang lemah tingkat keamanannya

Kurangnya dana untuk sarana dan prasarana LP menjadikan LP memiliki keterbatasan dalam hal pengamanan narapidana. Jumlah sipir yang kurang, sistem yang belum baik adalah permasalahan yang selalu dihadapi.

Berikut beberapa berita tentang kaburnya para narapidana dari LP:

Sebanyak 17 tahanan, Selasa (20/9) dini hari, kabur dari Rumah Tahanan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka berhasil menjebol plafon kamar dan memanjat pos pemantau di bagian kiri belakang Rutan Jantho. (Sumber: Harian Kompas, 22 September 2005)

Dua tahanan narkoba dan seorang tersangka curanmor kabur bareng dari ruang tahanan Polresta Solo Senin dini hari (2/1) dengan cara menggergaji jeruji besi yang menjadi sekat genteng. (Sumber: Harian Media Indonesia, 2 Januari 2006)

### 4. Keputusan Pemerintah tentang LP

"Perancangan LP yang ada saat ini merujuk pada Keputusan Pemerintah berikut:

**Nomor** : M – 01.PR.07.10 Tahun 2005  
**Tentang** : Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah  
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI"

(Sumber: Pernyataan Ir. Suroso, M.M., IAI)



### 1.2.3 Tinjauan Kota Klaten



gambar. Peta Kota Klaten

**Klaten** adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Klaten terletak di antara 110o30" - 110o45" BT serta 7o30" - 7o45". Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dengan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Berdasarkan letak ketinggian tempat, dataran rendah terletak 75 m dari permukaan laut dan yang tertinggi 2911 m di atas permukaan laut. (Sumber: Wikipedia Indonesia\_Kabupaten Klaten)

Dari 1,28 juta jiwa penduduk Klaten, sekitar 286.500 jiwa (22,35%) di antaranya tergolong miskin. Malah berdasarkan laporan Indonesia Human Development (2004), persentase warga miskin di Klaten saat ini 24,5 persen, dan berada di urutan 14 dari 35 kabupaten/kota di Jateng untuk kategori daerah dengan persentase penduduk miskin terbanyak.

(Sumber: Harian Suara Merdeka, 19 Juli 2005)

### 1.2.4 Tinjauan LP di Klaten

LP klaten mempunyai status LP kelas IIB. Kelas IIB memiliki arti bahwa tingkat hunian di LP tersebut berjumlah 250 orang narapidana. Keadaan sel tahanan yang buruk didalam LP menjadikan LP tidak sehat dan narapidana sering terserang penyakit.



### **1.3 PERMASALAHAN**

Bagaimana menata masa, mengolah ruang luar, mengolah susunan ruang dalam LP tipe II A agar menunjang sistem keamanan dan kelancaran pembinaan.

### **1.4 TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.4.1 Tujuan**

Mendapatkan konsep LP kelas II A di Klaten.

#### **1.4.2 Sasaran**

- a. (1) Dapat merancang fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang secara psikologis memaksimalkan proses pembinaan narapidana.
- (2) Dapat merancang fasilitas sel tahanan yang sehat
- b. Dapat mengolah pola bangunan yang tersistematis.

### **1.5 LINGKUP PEMBAHASAN**

#### **1.5.1 Arsitektural**

Lingkup pembahasan dalam aspek arsitektural meliputi :

- a. Mengenai keputusan pemerintah terhadap perancangan Lembaga Pemasyarakatan
- b. Ruang dalam dan luar sel tahanan yang ideal dalam segi keamanan, pengawasan, dan faktor psikologis narapidana
- c. pengolahan pola bangunan

#### **1.5.2 Non Arsitektural**

- Pembahasan meliputi pengertian Lembaga Pemasyarakatan, kondisi kabupaten Klaten, serta keberadaan Lembaga Pemasyaraktan dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.
- Pembahasan tentang psikologi narapidana di dalam sel tahanan.
- Pembahasan tentang narapidana residivis



## 1.6 METODA PEMBAHASAN

### 1.6.1 Pencarian Data

- a. Survey lokasi
  1. Observasi terhadap lokasi, analisa site dan lingkungan sekitar site
  2. Observasi langsung pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan, juga bangunan lain yang dapat diambil sebagai referensi
  3. Mengamati perilaku warga binaan dan sipir di dalam lembaga pemasyarakatan
- b. Studi Literatur
  1. Mempelajari hal-hal tentang Lembaga Pemasyarakatan
  2. Studi data-data dari instansi-instansi terkait
  3. Studi literatur tentang perancangan-perancangan yang terkait dengan judul
- c. Wawancara Mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait maupun masyarakat sekitar

## 1.7 KEASLIAN PENULISAN

Ada beberapa literatur Tugas Akhir Mahasiswa yang menyerupai dengan judul penulis namun judul-judul tersebut memiliki perbedaan penekanannya. Beberapa literatur Tugas Akhir Mahasiswa digunakan penulis didalam penulisan LP bersistem Pesantren, namun ada beberapa



literatur yang tidak digunakan dan hanya bersifat pemberitahuan/informatif.

### 1.7.1 Tugas Akhir

Beberapa judul yang digunakan sebagai literatur dalam penulisan adalah:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kotamadya Yogyakarta  
Penekanan suasana ruang serta penampilan bangunan yang mendukung konsep pemasyarakatan.  
Oleh: Meidiyani TA/UII Tahun 1996  
Isi: Pengertian LP, Latar belakang LP, Sistem Hunian Narapidana, penampilan ruang dan aspek psikologis dikaji dalam sudut pandang arsitektur, asumsi perancangan fisik Lembaga Pemasyarakatan, asumsi kebutuhan ruang dan besaran ruang.
2. LP Yogyakarta  
Penciptaan ruang dalam, ruang luar yang bersifat rehabilitatif  
Oleh: Edi Prawoto TA/UII Tahun 2002  
Isi : Tinjauan teoritis, tinjauan faktual serta objek pembanding yang berkaitan dengan LP di Yogyakarta. Wawancara tentang keadaan psikologis narapidana. Asumsi-asumsi penulis tentang analisa sirkulasi ruang luar, konsep kebutuhan ruang, besaran ruang, lokasi, tata ruang luar, tata pengolahan massa, kualitas ruang.

Beberapa judul yang tidak diambil didalam penulisan adalah:

1. LP Pemuda (Pria) ditinjau dari segi psikologi & keamanan di Yogyakarta  
Oleh: Ratna Evianty TA/UII  
Keterangan: Literatur tidak ditemukan



### 1.7.2 Laporan Kerja Praktek

1. Tingkat Kenyamanan dan Kelayakan Ruang Hunian Narapidana berkaitan dengan nilai standar ruang pada Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta (Blok sel 5, 6, 7)

Oleh: Desi Rosnita Sari, Tahun 1999

Isi : Pengertian LP, penataan Ruang hunian menurut Grosfeld, asumsi penulis tentang nilai standar ruang pada Blok sel 5, 6, 7 LP Wirogunan Yogyakarta merujuk pada literatur Data Arsitek oleh Ernest Neufret

### 1.7.3 Instansi Pemerintah

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*. PT. Mediatama Saptakarya (PT. Medisa). Jakarta.
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2005. *Konsep Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*. Prosiding. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

## 1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

### Bagian pertama: Pendahuluan

Berisi tentang batasan judul, Latar belakang mengenai kondisi umum Lembaga Pemasyarakatan, permasalahan, tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, metoda, sistematika, dan kerangka pola pikir

### Bagian kedua: Data dan Teori

Berisi tentang data-data awal kawasan, berupa gambaran tentang kawasan dari sub yang terbesar sampai gambaran rinci mengenai



site dan lingkungan sekitarnya. Juga data-data mengenai keputusan pemerintah untuk Lembaga Pemasarakatan. Mengenai aktivitas dan kegiatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Berisi tentang Landasan teori dan kajian pustaka, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan perancangan Lembaga Pemasarakatan, teori yang menyangkut kebutuhan untuk jawaban permasalahan, teori tentang sistem didalam Lembaga Pemasarakatan. Kajian pustaka berupa contoh kasus dari bangunan lain yang serupa, yaitu Lembaga Pemasarakatan Batang dan Lembaga Pemasarakatan Pati, Jawa Tengah

#### **Bagian ketiga: Analisa**

Analisa kawasan, analisa kebutuhan ruang serta kegiatan untuk bangunan yang akan di buat, kemudian hasil akhir berupa tabel kebutuhan ruang, Analisa kualitas ruang terhadap kesehatan narapidana, Analisa penampilan berupa analisa terhadap bangunan Lembaga Pemasarakatan dan Pesantren, serta karakter yang terdapat didalamnya, yang dapat diambil dan diadopsi pada saat merancang Lembaga Pemasarakatan, dasar bentuk, dasar penampilan, sistem bangunan.

#### **Bagian keempat : Konsep Perancangan**

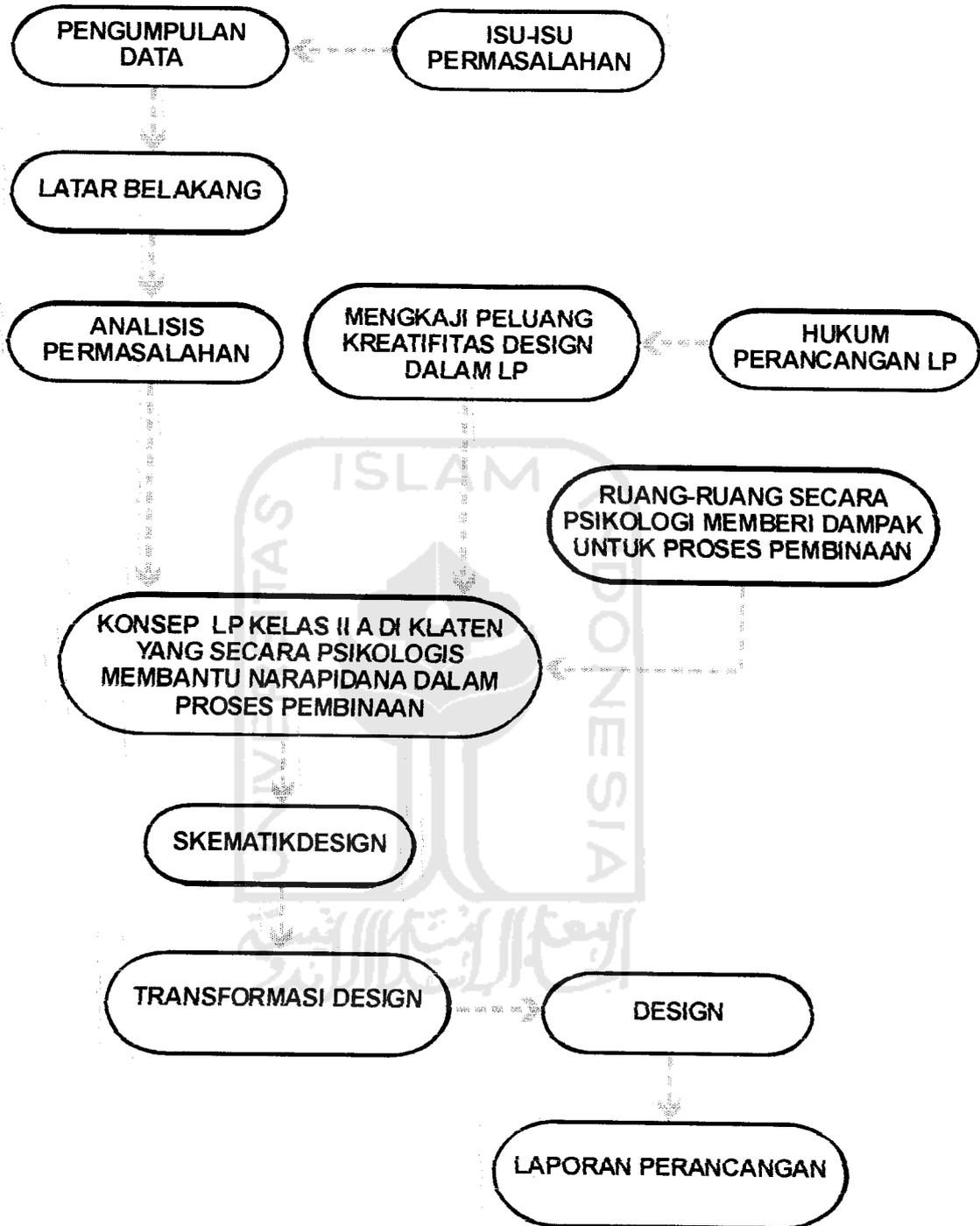
Hasil akhir dari beberapa analisa kebutuhan ruang serta kegiatan berupa tabel. Konsep-konsep yang akan diterapkan dalam perancangan dari beberapa analisa pada bagian ketiga.

#### **Bagian kelima : Perancangan**

Berisi tentang hasil rancangan dan penjelasan-penjelasan mengenai hasil rancangan yang sudah dibuat.



### 1.9 KERANGKA POLA PIKIR





### 1.10 SPESIFIKASI PROYEK

1. Judul : Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA di Klaten, Jawa Tengah.
2. Lokasi : Desa Pesu, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
3. Kriteria LP :
  - Wilayah pelayanan LP adalah LP tingkat kabupaten, dengan masa penahanan kurang atau sama dengan 1 tahun (berdasarkan hukum)
  - Tingkat hunian LP adalah 500 orang, standar LP kelas IIA
  - LP menampung narapidana Pria dan Wanita
  - LP menampung narapidana dewasa (usia 21 tahun)
  - LP berdasarkan status narapidana adalah LP umum
  - LP menampung tahanan titipan kepolisian, kejaksaan, hakim dan MA.
  - Tingkat keamanan LP adalah minimum security.
4. Luas Site : Luas site  $\pm 34.288m^2$ . Bentuk site terdapat dalam lampiran.  
Luas site akan mengalami tambahan berdasarkan konsep.
5. Pertimbangan pemilihan site :
  - Berdasarkan zona/wilayah pengembangan kota Klaten dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, arah perkembangan Kota Klaten adalah ke arah Timur, yaitu: ke Sukoharjo, ke arah Barat, yaitu: ke Sleman, Yogyakarta, dan ke Utara, yaitu: ke Boyolali dan Semarang. Sedangkan ke arah Utara, yaitu ke Gunung Kidull, Yogyakarta, perkembangan kota tidak diutamakan. Sehingga wilayah tersebut tepat jika didirikan sebuah LP.
  - Narapidana kebanyakan berasal dari Klaten sehingga pihak keluarga mudah membesuknya.



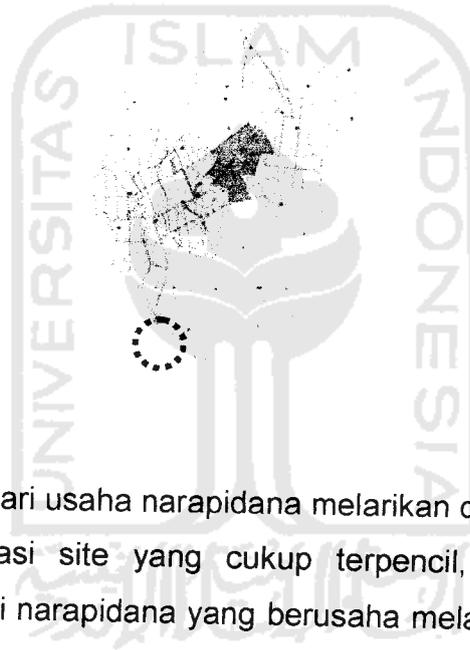
## 1.11 PEMILIHAN SITE

### 1.11.1 DASAR – DASAR PEMILIHAN SITE

Site berada di desa Pesu, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

#### 1. Rencana Perkembangan Kota

LP sebaiknya berada pada lingkungan yang tidak padat penduduknya. Dari RUTR Kota Klaten tahun 2006, Kecamatan Wedi merupakan area yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah dan bukan area yang diperuntukkan sebagai area pengembangan Kota Klaten.



#### 2. Keamanan dari usaha narapidana melarikan diri

Dengan lokasi site yang cukup terpencil, maka sangat tidak kondusif bagi narapidana yang berusaha melarikan diri. Setidaknya membutuhkan waktu lama menuju jalan raya.

#### 3. Unsur alam

Site bebas polusi udara sehingga membantu narapidana dalam proses pembinaan psikologi narapidana

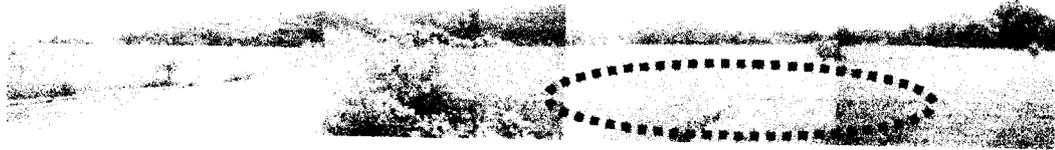
#### 4. Lahan produktif

Lahan produktif dapat digunakan narapidana dalam tahap asimilasi akhir untuk bekerja.



### 1.11.2 BATASAN LAHAN

Site berada pada areal yang dilingkari pada gambar. Site dikelilingi areal persawahan. Pada bagian Timur terdapat bukit yang dijadikan view utama dari dalam LP.



Gambar. Foto panorama site

